
ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WISATA KARANG BAJO

Oleh

Moh. Ari Rafandi¹, Sri Susanty², Agusman³, Muharis Ali⁴

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Email : ¹arirafandi7@gmail.com, ²srisusanstympar@gmail.com &

³suganam@gmail.com, ⁴muharisali1@gmail.com

Article History:

Received: 03-06-2023

Revised: 16-07-2023

Accepted: 25-07-2023

Keywords:

Cultural Tourism

Community

Empowerment, Karang

Bajo, Community.

***Abstract:** In this study, researchers used descriptive qualitative methods. The data collected in this study were sourced from the results of interviews, and documentation from parties related to community empowerment in the Karang Bajo tourist village. Researchers used data analysis, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Of all the data that has been processed and analyzed of course get the results of the research. Empowerment in the Karang Bajo tourist village that has been carried out includes capital assistance in the form of assistance to woven fabric craftsmen and assistance for renovating traditional houses. Assistance for infrastructure development in the form of the construction of the Sebaya Tanta heritage hall and traditional houses, repairing the road to Sebaya Tanta and the area around the ancient mosque. Mentoring assistance on traditional schools from the Directorate of Belief in God Almighty, assistance from the Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago and Santiri related to tourism from the perspective of indigenous peoples and waste management, assistance from students of the Mataram High School of Tourism Real Work Lecture related to tourism and leadership management. Institutional strengthening with the establishment of the Gubug Karang Bajo-Bayan Traditional Institution Institution, other community empowerment institutions such as Karang Taruna, PKK, and Pokdarwis. The partnership activity carried out is to establish partners between the indigenous people of Karang Bajo with the Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago and Santiri related to tourism and the lives of indigenous peoples.*

PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di pulau Lombok yaitu di kabupaten Lombok Utara memiliki berbagai potensi wisata yang menarik yang terus mengalami perkembangan. Salah satu keunggulan dari Kabupaten Lombok Utara adalah wisata budaya (culture tourism) khususnya kawasan rumah adat Karang Bajo yang bertempat di desa Karang Bajo. Paket wisata yang diandalkan menitikberatkan pada culture tourism karena desa wisata Karang Bajo terkenal dengan kebudayaannya yang menawarkan keasrian, keindahan, sosial budaya, sejarah, adat istiadat, dan paket wisata.

Mardi Yatmo Hutomo (2000: 7-10) menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan pemberdayaan

masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kegiatan, yaitu bantuan modal, bantuan pembangunan prasarana, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan dan penguatan kemitraan.

Beberapa upaya pemberdayaan masyarakat ini dilakukan guna meningkatkan taraf pengetahuan mereka. Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan terkait dengan peningkatan di sektor pariwisata itu sendiri. Peningkatan di sektor pariwisata ini tentunya harus seimbang dengan tingkat pengetahuan masyarakat sekitar agar dapat membuka pola pikir masyarakat yang baru guna untuk membuka peluang usaha yang baru dan nanti kedepannya menjadikan masyarakat setempat memiliki intelektual dan termotivasi sebagai penggagas, penggerak, sekaligus sebagai pelaku pariwisata, bukan hanya menjadi penonton saja.

Dalam implementasi pemberdayaan masyarakat pada sektor pariwisata di desa Karang Bajo terkendala oleh masyarakat terutama orang dewasa yang bertempat tinggal di sekitar kawasan adat kebanyakan memilih pekerjaan sebagai petani, sehingga kegiatan masyarakat tidak terfokuskan kepada kegiatan kepariwisataan. Para pemuda yang kebanyakan memilih menjadi porter untuk pendakian gunung, tetapi kurang tergerak menjadi tour guide untuk destinasi wisata di Desa Karang Bajo. Kegiatan pariwisata belum terorganisir dengan baik seperti pelaksanaan event-event pariwisata dilakukan hanya pada waktu tertentu saja, padahal pengunjung yang datang selalu ada. Organisasi Pokdarwis yang ada di sana beranggotakan para pemuda yang masih berstatus pelajar seperti SMP maupun SMA/SMK. Serta adanya 2 kepengurusan Pokdarwis yang terbentuk dimana hal ini dapat menghambat kinerja Pokdarwis itu sendiri karena terdapat perbedaan pendapat diantara keduanya, satu dengan yang lainnya saling bersaing sehingga rawan konflik dan dalam bekerja tidak terfokus kepada tujuan awal dibentuknya organisasi ini.

LANDASAN TEORI

Penelitian sumber-sumber pustaka lainnya memiliki banyak manfaat bagi penelitian yang akan dilakukan. Berikut pemaparan dari sejumlah penelitian relevan tersebut. Penelitian pertama oleh Hidayat (2019). Penelitian yang berjudul, Analisis Pengelolaan Kampung Sasak Ende Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Berbasis Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengelolaan kampung Sasak Ende merupakan pengelolaan yang sepenuhnya berbasis pemberdayaan masyarakat atau *Community Based Tourism* (CBT) dan diterapkan dalam bentuk partisipasi langsung atau masyarakat telah secara langsung menjalankan kegiatan pariwisata di kampung Sasak Ende dengan mengambil peran sebagai subjek dan objek secara bersamaan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menekankan kepada pengelolaan daya tarik wisata, sedangkan penelitian ini menekankan kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan. Informan yang dimiliki berbeda, dimana penelitian terdahulu memasukkan pengunjung ke dalam daftar informan. Sementara, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama berbasis masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian terdahulu dengan penelitian ini melakukan penelitian di kawasan kampung adat.

Penelitian kedua oleh Hidayah (2017). Penelitian yang berjudul, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Gilimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo antara lain: Bantuan modal, bantuan dari PNPM Mandiri Pariwisata, bantuan pembangunan prasarana, meliputi gardu pandang, mushola, kamar mandi, joglo, ruang aula, permainan anak, panggung teater, dan lain-lain, bantuan pendampingan, pelatihan pemandu wisata, manajemen wisata, pembukuan tentang wisata, struktur organisasi,

pengelolaan obyek wisata goa, bahasa asing, kuliner, dan manajemen pengelolaan wisata pedesaan, penguatan kelembagaan, pokdarwis dan kesekretariatan pengelola Desa Wisata Jatimulyo, RT, RW, pemerintah Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, pemerintah daerah kabupaten Kulon Progo dan Provinsi DIY dan desa wisata lain, penguatan kemitraan, antara masyarakat, pemerintah, dan swasta yakni pemerintahan Desa Jatimulyo, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, perguruan tinggi di DIY, organisasi di bidang rescue, PLN, Indosat, dan lainnya.

Faktor pendukung diantaranya adalah potensi wisata yang melimpah, semangat dan respon positif dari masyarakat, serta bantuan dari PNPM Mandiri Pariwisata. Sedangkan faktor penghambat yang muncul yakni kualitas SDM yang masih rendah dan kurang profesional, belum ada peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang desa wisata khususnya Desa Wisata Jatimulyo, dan pencatatan kepariwisataan yang belum jelas. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu terdapat pembahasan tentang faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat sedangkan penelitian ini hanya membahas kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa wisata Karang Bajo. Lokasi dilakukannya penelitian berbeda, penelitian terdahulu melakukan penelitian di desa Watimulyo, Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di desa Karang Bajo, Nusa Tenggara Barat. Sementara, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif. Informan kedua penelitian ini sama. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama berbasis masyarakat. permasalahan pada bantuan modal, pembangunan prasarana, pendampingan, penguatan kelembagaan, serta kemitraan.

Penelitian ketiga oleh Rindi (2019) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata. Hasil penelitian ini Penelitian ini meneliti tentang potensi yang ada di desa wisata dengan melihat potensi yang ada seperti kerajinan bambu, grass track, dan embung tirtayasa. Sumber data yang diperoleh dari kepala desa, ketua Pokdarwis Wonokarto, ketua grasstrack, paguyuban Guyub Rukun dan masyarakat setempat untuk dijadikan narasumber. Dari hasil penelitian banyak ditemukan kerasi unik dan ide menarik dengan adanya desa wisata menambah peluang penghasilan bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran serta mengurangi kejahatan di wilayah tersebut dengan melatih anak muda membuat kreasi terbaru dan bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Dengan adanya desa wisata dapat memberdayakan masyarakat desa Wonokarto. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menekankan kepada potensi yang dimiliki di desa wisata, sedangkan penelitian ini meneliti tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan. Lokasi dilakukannya penelitian berbeda, penelitian terdahulu melakukan penelitian di desa Wonokarto, Lampung. Sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di desa Karang Bajo, Nusa Tenggara Barat. Sementara, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif. Kedua penelitian ini memiliki daftar informan yang sama. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama berbasis masyarakat.

Secara etimologis kata pariwisata berasal dari bahasa sansakerta yang terdiri dari atas dua suku kata yaitu “pari” yang berarti banyak, berkali – kali, berputar – putar, dan keliling. Sedangkan kata “wisata” yang berarti perjalanan atau bepergian. Dengan demikian pengertian dari kata pariwisata yaitu suatu perjalanan yang dilakukan secara berkali – kali atau berputar – putar dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. (Sapta dan Landra, 2018: 1)

Menurut Pendit (1994) pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis – jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut: (1) Wisata Budaya, seorang melakukan perjalanan wisata atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan

hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, budaya dan seni mereka. Sering perjalanan kesempatan–kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan–kegiatan budaya; (2) Wisata Kesehatan, hal ini dimaksudkan dengan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat tinggalnya sehingga bisa mengobati kelelahan–kelelahan jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mandi disumber air panas atau tempat menyediakan fasilitas–fasilitas kesehatan lainnya; (3) Wisata Olahraga, ini dimaksudkan dengan wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga disuatu tempat atau Negara; (4) Wisata Komersial, dalam jenis termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran – pameran dan pekan raya yang bersifat komersil seperti pameran industry, pameran dagang, dan sebagainya; (5) Wisata Industri, perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang–orang ke suatu kompleks daerah perindustrian dimana pabrik–pabrik atau bengkel–bengkel besar, dengan tujuan dan maksud untuk mengadakan peninjauan atau penelitian; (6) Wisata Politik, perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam pariwisata kegiatan politik; (7) Wisata Konvensi, berbagai Negara dewasa ini membangun wisata konvensi dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan–ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah atau pertemuan lainnya; (8) Wisata Sosial, pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan misalnya buruh, petani, atau mahasiswa; (9) Wisata Pertanian, pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek–proyek pertanian, perkebunan, dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan; (10) Wisata Maritim atau Bahari, jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga air, seperti di danau, pantai, atau memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar.

Sapta dan Landra (2018: 5) Modal atau sumber pariwisata dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu; potensi alam, potensi kebudayaan, dan potensi manusia. Potensi–potensi tersebut yaitu; (1) Potensi Alam, terdiri dari atas potensi fisik, flora, dan fauna. Ketiga potensi alam tersebut dapat menjadi atraksi wisata yang berperan sama, tetapi salah satu atraksi dapat lebih menonjol. Pada umumnya wisatawan lebih tertarik pada alam terbuka seperti pegunungan, hutan, dan pantai; (2) Potensi Kebudayaan, yaitu kebudayaan dalam arti luas, tidak hanya meliputi kebudayaan tinggi, tetapi juga meliputi adat istiadat segala kegiatan di tengah–tengah masyarakat; (3) Potensi Manusia, yaitu kemampuan yang ada dalam diri manusia yang dapat di dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, menurut Winarni dalam (Ambar teguh S, 2004) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat tersebut, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Dwidjowijoto (2007) menerangkan konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian community development (pembangunan masyarakat) dan community based development (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah community driven development yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau di istilahkan sebagai pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat. Konsep empowerment (pemberdayaan) sebagai konsep alternatif pembangunan yang pada intinya menekankan pada

otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.

Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik- material.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Ambar Teguh (2004: 80-81) menjelaskan terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal.

Secara umum, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Mardi Yatmo Hutomo (2000) dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan, yaitu; (1) Bantuan modal, pemberdayaan masyarakat dalam hal permodalan merupakan salah satu aspek yang sering dihadapi. Aspek permodalan ini sangat penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat karena apabila tidak ada modal maka masyarakat tidak akan mampu berbuat untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya; (2) Bantuan pembangunan prasarana, adanya bantuan prasarana dalam melakukan pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mendorong masyarakat agar berdaya. Tersedianya prasarana di tengah-tengah masyarakat yang kurang berdaya akan mendorong dan meningkatkan mereka untuk menggali potensi-potensi yang dimilikinya. Selain itu, dengan adanya prasarana akan memudahkan mereka untuk melakukan aktivitasnya; (3) Bantuan pendampingan, pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama seorang

pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk masyarakat. Pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman di antara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Kesenjangan dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan keterbatasan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karenanya para pendamping di tingkat lokal harus dipersiapkan dengan baik agar memiliki kemampuan untuk memfasilitasi dengan sumber-sumber baik formal dan informal; (4) Penguatan kelembagaan, adanya sebuah lembaga atau organisasi di tengah tengah masyarakat merupakan salah satu aspek penting. Fungsi dari keberadaan lembaga tersebut adalah untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan akses-akses yang diinginkan, seperti permodalan, media musyawarah, dan lain sebagainya; (5) Penguatan kemitraan, pemberdayaan masyarakat adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang menengah dan besar. Daya saing yang tinggi hanya ada jika keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab, hanya dengan keterkaitan yang adil maka efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan masing-masing pihak akan diberdayakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Peneliti memilih lokasi ini, karena di desa wisata Karang Bajo memiliki situs bersejarah yaitu masjid kuno Bayan, terdapat perkampungan adat, rumah adat khas Lombok Bayan yang tetap dengan bentuk aslinya, ada sekolah adat, terdapat pengrajin kain tenun khas Lombok. Jarak tempuh perjalanan dari Kota Mataram ke Desa Karang Bajo sekitar 2-3 jam perjalanan. dan melewati beberapa kecamatan yang ada di Lombok Utara diantaranya: Kecamatan Pemenang, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, dan Kecamatan Kayangan.

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu; (1) Wawancara, wawancara mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan di desa wisata Karang Bajo dengan Kepala Desa, tetua adat Karang Bajo, Ketua Pokdarwis, dan Ketua Pemuda; (2) Dokumentasi. Foto pembangunan prasarana dan serta kegiatan kegiatan sosialisasi atau pendampingan.

Penentuan informan dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiono (2016) teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Adapun ciri-ciri informan yang dipilih dalam kegiatan penelitian sebagai berikut; (a) Informan yang tinggal di desa Karang Bajo, terutama di sekitar kawasan kampu adat; (b) Kepala daerah (kepala desa) yang dipilih dan telah menjabat kurang lebih 2 tahun; (c) Peserta aktif dalam kelompok atau organisasi Pokdarwis atau organisasi kepemudaan dan telah menjabat lebih dari 2 tahun masa jabatan; (d) Tetua adat desa Karang bajo yang mengurus masalah kemasyarakatan; (e) Memiliki informasi terkait dengan pemberdayaan masyarakat di desa Karang Bajo.

Analisis data menurut Moleong (2012:280) adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan teknik analisis data interaktif dimana analisis data

dilakukan pada saat pengumpulan data dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Sugiyono (2009) menjelaskan Proses analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan model Miles dan Huberman dalam yaitu sebagai berikut; (a) Reduksi Data, mereduksi data memiliki arti yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Reduksi data dilakukan setelah peneliti melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini setelah peneliti memperoleh data tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata budaya warisan di kawasan rumah adat Karang Bajo maka selanjutnya mereduksi data-data yang diperoleh dari lapangan. Jumlah data yang diperoleh peneliti sangatlah banyak, oleh sebab itu maka harus dilakukan pemilihan data dan menggolongkannya sesuai dengan kategori yang berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata budaya warisan, dan membuang data yang tidak penting bagi peneliti. Selanjutnya peneliti dapat merangkum hal-hal pokok melalui reduksi data yang sesuai dengan tema penelitian; (b) Penyajian Data, sekumpulan informasi yang telah tersusun, yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. Dengan melalui penyajian data, maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart dan sebagainya; (c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Setelah data-data terkumpul, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi serta di uji validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut pemaparan pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat di desa wisata Karang Bajo.

a. Bantuan Modal

Berdasarkan hasil temuan data mengenai bantuan modal di desa wisata Karang Bajo, dapat dijelaskan bahwa bantuan modal yang masuk belum optimal. Mardi yatmo Purnomo (2010) menyatakan bahwanya pemberdayaan masyarakat dalam hal permodalan merupakan salah satu aspek yang sering dihadapi. Aspek permodalan ini sangat penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat karena apabila tidak ada modal maka masyarakat tidak akan mampu berbuat untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya. Bantuan modal yang masuk di desa wisata Karang Bajo berupa bantuan bahan baku untuk pembuatan kain tenun dan bantuan perbaikan balai pusak Sebaya Tanta.

Untuk kegiatan renovasi balai Sebaya Tanta dilakukan pada tanggal 5 januari 2017 balai pusaka Sebaya Tanta yang dijadikan sebagai balai rakyat desa Karang Bajo mendapatkan biaya renovasi sebesar Rp. 15.000.000, dari Kementerian Desa PDT bekerjasama dengan Rektor Universitas Mataram yang merupakan bagian dari program Laboratorium Desa yang diganti namanya diganti menjadi Pusat Pembelajaran Desa Mandiri.

Untuk kegiatan renovasi balai Sebaya Tanta dilakukan pada tanggal 5 januari 2017 balai pusaka Sebaya Tanta yang dijadikan sebagai balai rakyat desa Karang Bajo mendapatkan biaya renovasi sebesar Rp. 15.000.000, dari Kementerian Desa PDT bekerjasama dengan Rektor Universitas Mataram yang merupakan bagian dari program Laboratorium Desa yang diganti namanya diganti menjadi Pusat Pembelajaran Desa Mandiri.

Program ini ada beberapa bidang, salah satunya bidang balai rakyat. Pusat Pembelajaran Desa Mandiri Regional III Bali Nusa Tenggara untuk wilayah Nusa Tenggara Barat ditunjuk oleh

Kemendes hanya 2 desa yaitu Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dan Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar. Kaitannya dengan keberadaan Pusat Pembelajaran Desa Mandiri Balai Sebaya Tanta mendapatkan biaya renovasi dari Kemendes ini, pemerintah pusat tidak menyediakan biaya pengadaan bangunan namun yang boleh hanya merenovasi bangunan yang sudah ada. Biaya yang diberikan digunakan untuk memperbaiki atap Balai Pusaka Sebaya Tanta yang dulunya menggunakan genteng sekarang diganti menggunakan multirup dan penggantian atap berugak saka enam menggunakan alang-alang. Bangunan ini dikelola oleh pengurus Pranata Adat Gubug Karang Bajo-Bayan. Diharapkan dengan adanya perbaikan bangunan ini sebagai titik awal aktivitas warga dalam rangka mendorong Program Laboratorium Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Karang Bajo.

Untuk para pengrajin kain tenun, para warga diberi bantuan berupa bahan pembuatan kain tenun seperti bahan baku seperti benang untuk menenun. Bantuan ini diberikan oleh pihak Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

b. Pembangunan Prasarana

Mardi yatmo Purnomo (2010) menyatakan adanya bantuan prasarana dalam melakukan pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mendorong masyarakat agar berdaya. Tersedianya prasarana di tengah-tengah masyarakat yang kurang berdaya akan mendorong dan meningkatkan mereka untuk menggali potensi-potensi yang dimilikinya. Selain itu, dengan adanya prasarana akan memudahkan mereka untuk melakukan aktivitasnya.

Bantuan pembangunan prasarana yang telah dilakukan di desa wisata Karang Bajo adalah sebagai berikut. Pembuatan dan perbaikan di jalan masuk gang Sebaya Tanta sepanjang 50m. Sasaran kegiatan ini adalah pembuatan jalan desa dan dana diperoleh dari dana desa, untuk pengaspalan jalan dipakai dari dana APBDN dan waktu pelaksanaan selama 2 minggu pengerjaan. Perbaikan ini dilakukan oleh masyarakat secara gotong royong dan bantuan bahan baku berupa pasir, semen, dan bahan lainnya diperoleh dari desa dan dana koperasi adat.

Pembangunan Balai Pusaka Sebaya Tanta yang merupakan bantuan dari Kepala Balai Pengembangan Teknologi Pemukiman Tradisional Denpasar/LITBANG PU BALI NUSRA. Pembangunan Balai Pusaka Sebaya Tanta dilakukan atas hasil dari konferensi Pulau Kecil Indonesia pada bulan mei tahun 2010. Pengembangan disepakati akan dilakukan di Kabupaten Lombok Utara dengan pertimbangan bahwa KLU adalah kabupaten baru, kondisi geografis dan geologis yang berkarakter pulau, eksistensi nilai-nilai lokal dan masyarakat adat. Dalam pembangunannya dikembangkan konsep model Eco-Techno Village di gubug adat Karang Bajo. Konsep Echo-Techno Village sebagai landasan pengembangan desa Karang Bajo sebagai model pengembangan desa adat ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Konsep tersebut telah mendapat dukungan dari beberapa pihak, salah satunya dari BPTPT Denpasar. Sebagai Badan Pengembangan Teknologi Permukiman, BPTPT Denpasar telah menyumbang 3 model bangunan yang menggunakan material dari bahan lokal, berupa Bale Gundam (terbuat dari limbah batu apung), Homestay (terbuat dari bambu laminasi), dan Berugak Sakenam (terbuat dari kayu Sengon laminasi).

Sebagai model pengembangan desa adat, konsep besar ini disepakati dinamakan sebagai Pusaka (Pusat Keberdayaan Warga) "SEBAYA TANTA". Pembangunan 3 model bangunan tersebut dimulai bulan januari 2011, yang peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 7 maret 2011. Peresmian Bangunan Model Pusaka "SEBAYA TANTA" pada tanggal 14 juli tahun 2011. Model kawasan yang dikembangkan ini merupakan model yang pertama di Indonesia dan dijadikan sebagai pusat pembelajaran bagi warga Indonesia lainnya.

c. Pendampingan

Gunawan Sumodiningrat (2009) menyatakan pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman di antara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Kesenjangan dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan keterbatasan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karenanya para pendamping di tingkat lokal harus dipersiapkan dengan baik agar memiliki kemampuan untuk memfasilitasi dengan sumber-sumber baik formal dan informal.

Dalam meningkatkan kualitas masyarakat di desa Karang Bajo telah dilakukan pendampingan sebagai berikut

Pihak desa dalam melakukan pendampingan mendatangkan pihak luar seperti dalam bagian adat mendatangkan SANTIRI Foundation dan AMAN (Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara), lalu juga ada dari pihak dinas pariwisata. Pihak desa mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat guna meyakinkan mereka agar mau mengikuti kegiatan pendampingan dengan cara memberikan motivasi dan arahan agar pola pikir mereka terbentuk sehingga kelompok-kelompok tersebut bisa bertahan.

Program pendampingan yang sudah masuk ke pokdarwis itu merupakan program pengelolaan sampah mulai dari cara penanganan dan pengelolaan sampah hingga pemberian bantuan berupa bak sampah. Dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana pentingnya kebersihan kawasan kampu adat agar pengunjung yang datang ke lokasi adat merasa nyaman. Program ini dilaksanakan atas kerjasama lembaga pranata adat Karang Bajo dengan lembaga-lembaga pemerhati masyarakat. Masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan, area sekitaran kampu adat menjadi terjaga kebersihannya sehingga nyaman untuk dikunjungi.

Adanya pendampingan dari lembaga AMAN dan SANTIRI terkait dengan masyarakat adat. Pendampingan yang dilakukan berupa pemberian pemahaman tentang bagaimana pola pikir masyarakat adat, pembentukan karakter masyarakat adat. Agar masyarakat memiliki pola pikir yang maju terkait dengan pendidikan. Serta, menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat bahwa masyarakat adat itu bukanlah kaum yang kuno agar mampu bersaing dengan masyarakat pada umumnya.

Pada tahun 2021, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat diharapkan dapat menyediakan layanan pendidikan masyarakat adat berupa muatan kurikulum pendidikan masyarakat adat serta adanya model pengembangan sekolah adat. Oleh karena itu, pada tanggal 2-4 Juni 2021, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Visioning Penyusunan Basis Data Pengembangan Model Sekolah Adat Bayan di Aula Balenta, Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini bertujuan membentuk kesepakatan dan komitmen bersama terkait pengembangan model Sekolah Adat Bayan. Kegiatan Sosialisasi dan Visioning Penyusunan Basis Data Pengembangan Model Sekolah Adat Bayan ini merupakan tahapan kedua dari tahapan kegiatan Pengembangan Model Sekolah Adat yang termasuk di dalam Layanan Pendidikan Masyarakat Adat. Adapun narasumber di kegiatan ini antara lain: Sjamsul Hadi, SH, MM (Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Roem Topatimasang (INSIST), Renadi (Sekolah Adat Bayan) dan Tjatur Kukuh Surjanto (Santiri Foundation). Kegiatan ini turut mengundang berbagai pemangku kepentingan, antara lain dinas-dinas terkait di Kabupaten Lombok Utara, pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani, kepala desa, tokoh adat, pemuka adat dan pegiat adat. Kegiatan ini nantinya akan dilanjutkan dengan FGD Penggalan Data dan Informasi Sebagai Baseline Penyusunan Kurikulum SAB. Selanjutnya akan diadakan kegiatan Pelatihan dan Penjaringan Pemuda Sebagai Kolektor Data serta Penggalan Data

Lapangan Sebagai Baseline Penyusunan Kurikulum SAB yang rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Juli 2021 di Mataram dan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Sosialisasi terkait manajemen kepemimpinan dan pembahasan tentang kepariwisataan dilakukan oleh mahasiswa KKN STP Mataram. Sosialisasi ini beranggotakan para pemuda dan anggota pokdarwis itu sendiri. Program sosialisasi ini dilakukan selama 1 bulan masa KKN dengan bentuk pertemuan adalah kelas malam. Kelas malam ini dilakukan pada malam Selasa dengan para anggota KKN sebagai pemateri. Untuk pertemuan terakhir kelas malam ini diubah menjadi kegiatan perjalanan wisata yaitu dengan mengunjungi destinasi wisata dan mengeksplorasi destinasi tersebut.

d. Penguatan Kelembagaan

Mardi yatmo Purnomo (2010) adanya sebuah lembaga atau organisasi di tengah tengah masyarakat merupakan salah satu aspek penting. Fungsi dari keberadaan lembaga tersebut adalah untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan akses-akses yang diinginkan, seperti permodalan, media musyawarah, dan lain sebagainya.

Penguatan kelembagaan merupakan hal yang penting dalam menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penguatan kelembagaan yang dilakukan di desa Karang Bajo yaitu, Lembaga kemasyarakatan ini dibentuk guna memberdayakan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri terutama di sektor pariwisata. Contohnya untuk ibu-ibu PKK diberdayakan agar mampu menciptakan produknya sendiri untuk dijual sebagai cinderamata bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke desa wisata Karang Bajo. Penguatan kelembagaan di Pokdarwis, Dengan dilakukan penguatan kelembagaan pokdarwis ini diharapkan para anggota lebih terarah kedepannya sesuai dengan rencana atau tujuan yang ingin dicapai oleh pokdarwis. Lalu, menciptakan anggota yang paham akan tugasnya masing-masing sehingga kinerja pokdarwis menjadi lebih meningkat daripada sebelumnya. Mampu menghadirkan atau menciptakan event-event atau kegiatan yang mampu mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata Karang Bajo.

Pada tahun 2008, dibentuk sebuah lembaga yang belakangan dikenal dengan nama Lembaga Pranata Adat (LPA) Gubug Karang Bajo-Bayan. LPA Gubug Adat Karang Bajo-Bayan ini, sebagai lembaga penghubung antar komunitas adat Karang Bajo dengan komunitas adat lainnya, baik yang ada di Kabupaten Lombok Utara ataupun daerah lainnya di Indonesia. Dan sejak berdirinya lembaga adat tersebut berbagai kegiatan pun terus dilakukan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat adat setempat, seperti pelatihan bagi pranata dan praniti adat, hingga mengirim pemudanya belajar di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jakarta. Koperasi Serba Usaha Sebaya Tanta yang didirikan pada tahun 2004 lalu ini, berusaha member kemudahan bagi petani komunitas adat atau anggota lainnya dalam mendapatkan modal untuk melakukan usaha tani. Dana yang dikelola oleh Koperasi saat ini adalah dari Simpanan Pokok anggota sebesar Rp 100.000,00/anggota dan simpanan wajib Rp. 5.000,00/bulan, sehingga dengan dana yang minim, saat ini kegiatan yang berjalan hanya simpan-pinjam dengan sistem warnen, yaitu pengembalian atau penyeteroran setelah panen untuk petani, dan bulanan untuk non petani.

e. Kemitraan

Hidayah (2017) menyatakan pemberdayaan masyarakat adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang menengah dan besar. Daya saing yang tinggi hanya ada jika keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab, hanya dengan keterkaitan yang adil maka efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan masing-masing pihak

akan diberdayakan.

Kemitraan dilakukan guna menunjang serta membantu desa Karang Bajo dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa Lembaga pranata adat Gubug Karang Bajo-Bayan selama ini bekerjasama dengan lembaga pemerhati adat, salah satunya dengan lembaga AMAN. AMAN bersama dengan pranata adat sering melakukan berbagai macam penyuluhan baik itu terkait dengan masyarakat adat itu sendiri hingga di bidang sosial ekonomi masyarakat adat. Mulai terbentuknya pola pikir masyarakat adat yang lebih maju, lebih percaya diri terhadap keunikan yang dimiliki, dan mulai menciptakan produknya sendiri yang dapat diperjual-belikan. AMAN sendiri sering melakukan riset terhadap masyarakat adat Karang Bajo yang menghasilkan banyaknya buku-buku tentang masyarakat adat Karang Bajo. Masyarakat sangat antusias dalam menyambut kerjasama ini, dimana kerjasama ini memiliki banyak sekali manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga berharap agar lebih banyak lagi kemitraan yang masuk agar mendorong masyarakat pola pikir yang beragam guna menunjang kehidupan mereka dikedepannya nanti.

Dalam kerjasama ini pihak AMAN sering melakukan kegiatan adat seperti diadakannya perkemahan adat nusantara dan didalam sekaligus dilakukan penyuluhan terkat dengan kepariwisataan dengan sudut pandang masyarakat adat. Sementara itu, saat ini pihak desa belum ada melakukan kerjasama dengan pihak luar. Tentunya pihak desa sedang mngusahakan kerjasama dengan pihak luar kedepannya nanti, tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama dengan pihak swasta, dengan mempertimbangkan yang sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut; (a) Dalam melakukan penyuluhan mendatangkan pihak luar yang terkait dengan bantuan yang diberikan seperti dalam bagian adat mendatangkan SANTIRI Foundation dan AMAN (Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara); (b) Pembangunan yang dilakukan oleh pihak desa berupa perbaikan jalan masuk di kawasan Sebaya Tanta dan sekitaran kawasan Masjid Kuno; (c) Terdapat beberapa lembaga pemberdayaan masyarakat seperti, karang taruna yang beranggotakan para pemuda, PKK terkait dengan pemberdayaan wanita, dan lain-lain; (d) Untuk saat ini pihak desa belum ada melakukan kerjasama dengan pihak luar; (e) Masyarakat adat telah melakukan berbagai macam kegiatan dengan menggaet pihak luar seperti lembaga AMAN (Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara) dan SANTIRI Foundation. Dalam hal terkait dengan pembangunan yang dilakukan di sekitaran kawasan adat Karang Bajo sangat membantu masyarakat adat dimana pembangunan yang dilakukan berguna sebagai tempat pertemuan para warga, serta pembangunan sekolah adat; (f) Untuk mengelola bantuan yang diterima oleh masyarakat dibentuknya lembaga pranata adat yaitu LPA Gubug Karang Bajo-Bayan. Lembaga-lembaga Pranata adat ini dibentuk guna memfasilitasi masyarakat ketika ada keperluan dengan pihak luar dan pranata adat ini juga dibentuk guna menyelesaikan konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apabila terjadi konflik, masyarakat bisa mengelola konflik yang terjadi dengan adat istiadat yang dimiliki untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Masyarakat dalam pranata adat ini berperan sebagai penggerak maupun pendukung, karena yang menjadi anggota atau bagian dari pranata adat adalah masyarakat itu sendiri.

SARAN

Saran yang dapat diberikan atas dasar penelitian ini ialah untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk mempersiapkan dengan matang terkait dengan siapa yang akan menjadi informan, dikarenakan

sebagian besar masyarakat Karang Bajo berprofesi sebagai petani, sehingga sulit untuk mengumpulkan narasumber. Terus melakukan pendampingan berupa sosialisasi hingga monitoring kegiatan agar dapat meningkatkan kuantitas maupun kualitas pendampingan yang dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] HC Nugroho, S Zauhar, S Suryadi. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. Journal of Environment 2014, h.16-17.
- [2] Adi, I, R. (2008). Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- [3] Admin. 2021. "Sosialisasi dan Visioning Sekolah Adat Bayan di Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat",
- [4] <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/sosialisasi-dan-visioning-sekolah-adat-bayan-di-kabupaten-lombok-utara-nusa-tenggara-barat>, diakses pada senin 18 Juli 2022 pukul 20.21.
- [5] Ariadi, Irman. 2021. "Menjelajah Kampung Adat Karang Bajo".
- [6] <https://iariadi.web.id/menjelajah-kampung-adat-karang-bajo>, diakses pada minggu 27 juli 2022 pukul 10.27.
- [7] Author. 2014. "LPA Karang Bajo Sebagai Lembaga Penghubung Antar Komunitas Adat",
- [8] <http://primadonalombok.blogspot.com/2014/09/lpa-karang-bajo-sebagai-lembaga.html>, diakses pada senin 18 juli 2022 pukul 20.40.
- [9] Dwidjowijoto & Wrihatnolo, (2007). Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [10] Hamid H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makassar: De La Macca.
- [11] Hidayah, Novie Istorina. 2017 "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- [12] Hidayat, T. 2021. "Analisis Pengelolaan Kampung Sasak Ende Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Berbasis Masyarakat". Skripsi. Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Mataram.
- [13] Moleong, Lexy j.(2012). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [14] Maryani, D. & Nainggolan, R. (2019) Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- [15] Rindi, Tyas Arma. (2019) "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata". Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Metro. Lampung Timur.
- [16] Rorah, D. N. P. (2012). Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) di Desa Kebun Agung Kecamatan Imogiri. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Negeri Yogyakarta.
- [17] Sumarto, (2003). Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- [18] Theresia A.dkk. (2014) Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta
- [19] Usman, Sunyoto. 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [20] Yunus S., Suadi, & Fadli, 2017. Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu. Aceh: Bandar

Publishing.

- [21] Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN